

PERTEMUAN TAHUNAN INDUSTRI JASA KEUANGAN
ANNUAL FINANCIAL EXECUTIVE GATHERING

**"MEMACU PERTUMBUHAN"
"FOSTERING GROWTH"**

Jakarta, 18 Januari 2018
Jakarta, January 18th, 2018

Yang Kami muliakan,
Presiden Republik Indonesia - Bapak
Ir. H. Joko Widodo,
Yang Kami hormati,

- Ketua dan Pimpinan Lembaga Negara,
- Para Duta Besar,
- Gubernur beserta jajaran Deputy Gubernur Bank Indonesia ,
- Para Menteri Kabinet Kerja dan Pimpinan Lembaga Pemerintah,
- Ketua dan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.
- Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi XI DPR RI.
- Para Gubernur Kepala Daerah,
- Pendahulu kami sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,
- Rekan-rekan Anggota Dewan Komisiner OJK,
- Para Pimpinan Lembaga Internasional
- Para Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan, dan
- Hadirin sekalian yang berbahagia,

***Assalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat malam dan salam
sejahtera untuk kita semua.
Om swastiastu, namo buddhaya.***

1. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan pada malam hari ini.

- Your Excellency,
The President of the Republic of Indonesia – Bapak Ir. H. Joko Widodo,
The Honorables,
- Leaders of State Institutions,
 - Fellow Ambassadors of Foreign Countries;
 - Governor and Deputy Governors of Bank Indonesia,
 - Cabinet Ministers and Leaders of Government Institutions,
 - Chairman and Board of Commissioners of LPS,
 - Chairman, Deputy Chairman and Members of Commission XI of DPR RI,
 - Provincial Governors,
 - Former Chairman of Board of Commissioners of OJK,
 - Members of the Board of Commissioners of OJK,
 - Leaders of International Organizations
 - Leaders of Financial Services Institutions,
 - Distinguished Ladies and Gentlemen

***Assalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.
Good evening and best wishes to
all of us, Om swastiastu
Namo buddhaya***

1. We praise the God Almighty for the blessings and grace bestowed upon us that allow us to gather here at the Annual Financial Executive Gathering. this evening.

2. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan arahan bagi kami. Perhatian Bapak Presiden akan memberikan semangat baru bagi Kami di awal tahun 2018 ini untuk berkarya dan memberikan sumbangsih bagi pembangunan bangsa.
3. Kami, Anggota Dewan Komisiner, beserta seluruh jajaran OJK memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam memacu pertumbuhan dengan tetap menjaga kesinambungan berbagai kebijakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
4. Kami juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar OJK, dapat lebih efektif dalam menjawab dinamika dan tantangan pembangunan ekonomi nasional dan sekaligus dapat memenuhi ekspektasi masyarakat atas keberadaan OJK baik saat ini maupun ke depan.

Bapak Presiden yang Kami muliakan dan hadirin sekalian,

5. Kami memandang, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari sisi global, untuk pertama kalinya sejak krisis keuangan global 2008, pertumbuhan ekonomi global meningkat didorong oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi hampir seluruh negara. Sementara itu, risiko geopolitik global maupun kebijakan normalisasi negara-negara maju yang semula dikhawatirkan akan memberikan tekanan pada perekonomian global selama tahun 2017, relatif tidak signifikan.

2. We would also like to express our most sincere thanks to the President of the Republic of Indonesia, who has taken the time from his busy schedule to attend this event to give his wisdom and guidance to all of us. The President's kind attention will bring new spirit in the beginning of this new year for us to continue to strive and contribute to the development of our beloved country.
3. We, the OJK's Board of Commissioners along with all OJK officials, are highly committed to increasing the role of financial services sector in stimulating the growth while ensuring the sustainability of numerous policies that uphold the stability of our financial system.
4. We will also take necessary steps in an effort to enable OJK, to be more effective in responding to the dynamics and challenges in the national economic development, as well as to meet public expectation of OJK, at present and in the future.

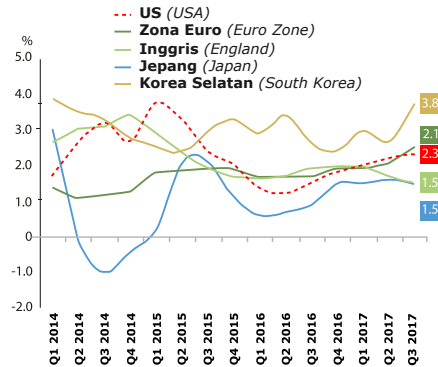
Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen,

5. In our view, now is the most opportune time to accelerate the growth of our economy. On the global front, it is the first time, since the 2008 global crises, that the global economy improves due to positive growth in most economies. In addition, the global geopolitical situation as well as monetary normalization policy in the developed economies, which were initially predicted to cause pressure to the global economy in 2017, turned out to be relatively insignificant.

Grafik 1

Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju

Economic Growth in Developed Countries

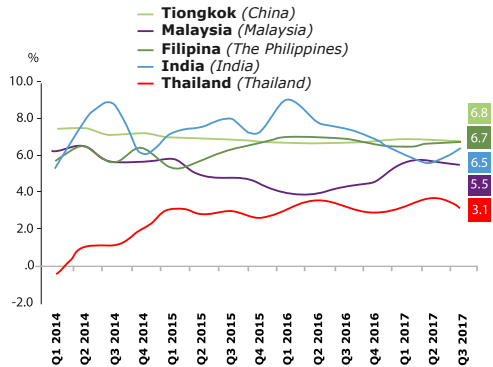


Sumber: Bloomberg, CEIC Database
Source: Bloomberg, CEIC Database

Grafik 2

Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang

Economic Growth in Developing Countries



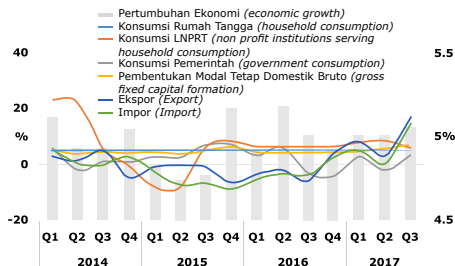
6. Dari sisi domestik, reformasi struktural yang konsisten dilakukan oleh Pemerintah mulai memperlihatkan hasilnya yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi tahun 2017 di kisaran 5-5,1%, nilai tukar Rupiah yang stabil, inflasi yang rendah (3,61% yoy), keseimbangan eksternal yang membaik ditandai oleh surplus neraca perdagangan sebesar USD11,8 miliar, defisit APBN yang terkendali di angka 2,42% terhadap PDB, serta kecenderungan suku bunga yang terus menurun.

6. On the domestic front, the consistent structural reforms carried out by the Government has shown material results reflected in 2017, with 5% – 5.1% economic growth, stable currency, low inflation rate (3.61% yoy), improved external balance demonstrated by trade surplus amounted to USD11,8 billion, manageable state budget deficit at 2.42% of GDP, as well as gradually decreasing interest rate.

Grafik 3

Pertumbuhan Ekonomi

Economic Growth

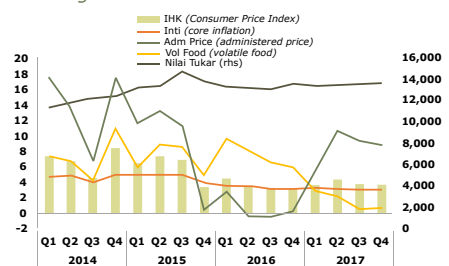


Sumber: Badan Pusat Statistik-Statistics Indonesia,
Source: Badan Pusat Statistik-Statistics Indonesia,

Grafik 4

Nilai Tukar Dan Inflasi

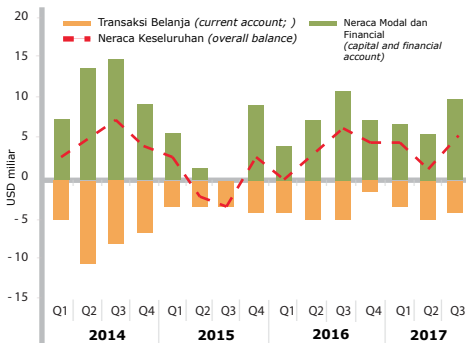
Exchange Rate and Inflation



Sumber: Badan Pusat Statistik
Source: Badan Pusat Statistik-Statistics Indonesia, Reuters

Grafik 5

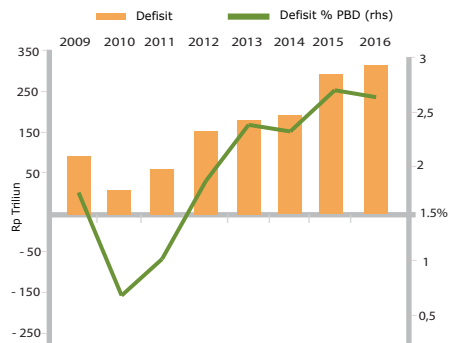
Neraca Pembayaran Balance of Payment



Sumber: Bank Indonesia
Source: Bank Indonesia

Grafik 6

Defisit APBN State Budget Deficit



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat
Source: Central Government Financial Report

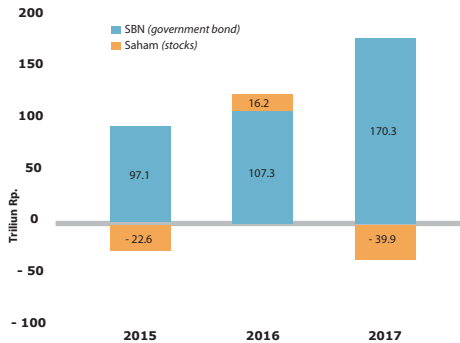
7. Reformasi dimaksud juga telah berhasil meningkatkan kepercayaan investor. Selama tahun 2017, arus modal nonresiden yang masuk ke pasar saham dan pasar Surat Berharga Negara tercatat sebesar Rp130,5 triliun. Inflow arus modal nonresiden yang cukup besar ini juga mendorong *yield* Surat Berharga Negara selama tahun 2017 turun sebesar 141 *bps*. Sementara itu, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam tren yang meningkat, ditutup pada level tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 6.355,65 atau tumbuh 20% *yoy*, yang menempatkan IHSG masuk 4 (empat) besar indeks bursa utama dengan kinerja terbaik di kawasan Asia-Pasifik.

7. These reforms have successfully increased investors' confidence. Throughout the year of 2017, non-resident capital inflows entering our capital market and sovereign bond market was recorded at Rp130.5 trillion. These significant inflows were able to push the yield of our Government Bond down by 141 bps. Meanwhile, the Jakarta Composite Index (IDX), which was in the increasing trend throughout the year and closed at the highest level in history, stood at 6,355.65 or grew 20% *yoy*. This has put IDX as one of the four major stock exchanges with highest performance in the Asia Pacific region.

Grafik 7

Net Buy/Sell Saham dan Surat Berharga Negara (SBN)

Net Buy/Sell Stock and Government Bonds



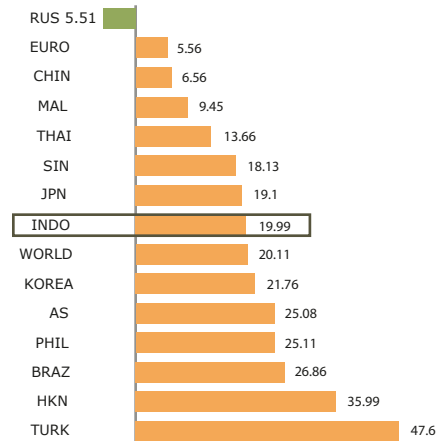
Sumber: DJPPR, Bloomberg

DJPPR Debt and Risk Management Office, Ministry of Finance, Bloomberg

Grafik 8

Indeks Saham Global

Global Stock Index



Sumber: Bloomberg
Source: Bloomberg

8. Keberhasilan reformasi struktural Indonesia ini diakui pula oleh lembaga dan investor global. Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai salah satu *top improvers* karena peringkat kemudahan investasi tahun 2018 melonjak 34 peringkat dalam 2 tahun terakhir menjadi posisi 72. World Economic Forum juga menaikkan peringkat daya saing Indonesia 2017-2018 dari peringkat 41 ke peringkat 36.

8. Government's structural reforms was also appreciated by global investors and multilateral institutions. The World Bank Group placed Indonesia as one of the top improvers for the country's efforts in improving the ease of doing business as it climbed 34 places to 72nd position within the past two years. Further, the World Economic Forum also increased the level of Indonesia's global competitiveness index in 2017-2018, from 41st to 36th place.

Grafik 9

Peringkat Ease of Doing Business dan Global Competitiveness Index

Ease of Doing Business Ranking and Global Competitiveness Index



Sumber: Bank Dunia, World Economic Forum
Source: Bank Dunia, World Economic Forum

9. Dari sisi peringkat utang, Standard and Poor's juga memperbaiki peringkat Indonesia dari BB+ menjadi BBB-, sehingga saat ini 3 (tiga) lembaga pemeringkat terbesar telah memberikan status *investment grade*. Fitch Ratings bahkan meningkatkan kembali peringkat utang Indonesia sebesar satu *notch* dari BBB- menjadi BBB dengan *outlook* stabil.

9. In terms of sovereign credit ratings, Standard and Poor's also upgraded Indonesia's rating from BB+ to BBB-; as such, the three world's biggest rating agencies have lifted Indonesia's status to investment grade. Fitch Ratings even increased Indonesia's rating one notch higher from BBB- to BBB with a stable outlook.

Tabel 1

Sovereign Credit Rating

	Moody's	S&P	Fitch
Investment Grade	Baa1	BBB+	BBB+
	Baa2	BBB	BBB
	Baa3	BBB-	BBB-
Non Investment Grade	Ba1	BB+	BB+
	Ba2	BB	BB
	Ba3	BB-	BB-

Sumber: Moody's, S&P, Fitch

Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian,

Your Excellency, esteemed ladies and gentlemen,

10. Sejalan dengan perkembangan perekonomian domestik, stabilitas sektor keuangan juga dapat terjaga dengan baik. Capaian ini merupakan modal yang penting bagi industri untuk dapat tumbuh lebih baik dan meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 ini.

10. In line with domestic economic development, stability in the financial services sector has been successfully maintained. This achievement is an important foundation for the financial industry to continue to improve and increase its role as the driver of economic growth for this year.

11. Dapat kami kemukakan, per Desember 2017, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan tercatat sebesar 23,36%. *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa juga berada di level tinggi masing-masing sebesar 310% dan 492%. *Gearing Ratio* perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,97 kali, jauh di bawah *threshold* sebesar 10 kali.

11. We are pleased to report that as of 2017, Capital Adequacy Ratio (CAR) of the banking sector was recorded at 23,36%. Risk-Based Capital (RBC) of general insurance industry and life insurance industry was at a high level, at 310% and 492% respectively. Further, gearing ratio of leasing company was amounted to 2.97 times, far below the threshold, which is 10 times.

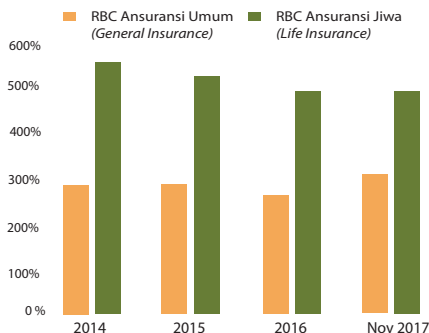
Grafik 10

Capital Adequacy Ratio



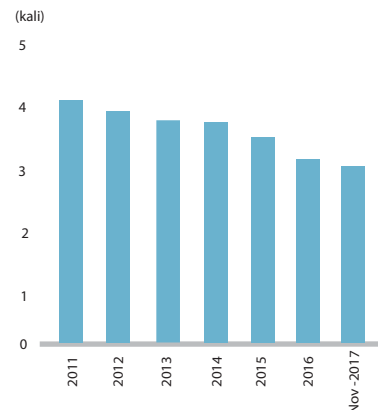
Grafik 11

Risk Based Capital



Grafik 12

Gearing Ratio



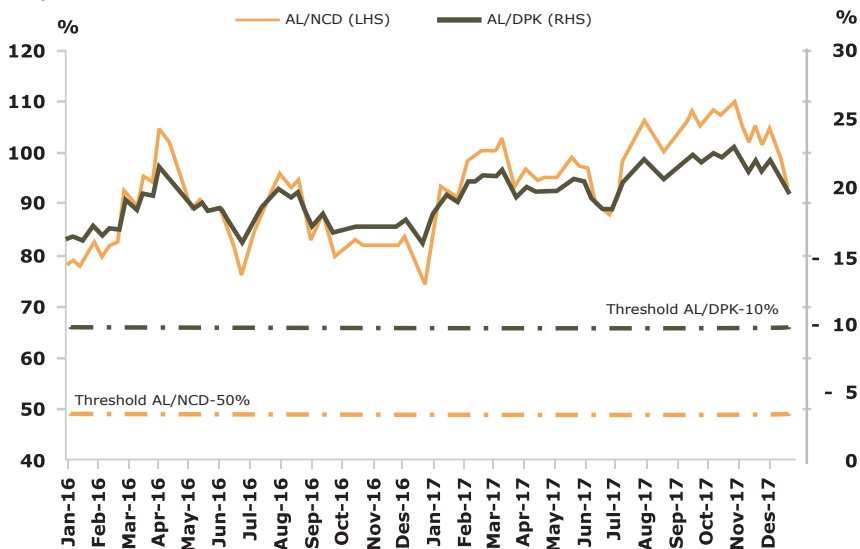
12. Kuatnya permodalan perbankan ini juga diikuti dengan likuiditas yang memadai. Pada Desember 2017, rasio Alat Likuid per *Non-Core Deposit* (AL/NCD) perbankan tercatat sebesar 90,48%, di atas *threshold* sebesar 50%. Sementara *excess reserve* perbankan tercatat dikisaran Rp626 triliun.

12. The strong capital in the banking sector is complemented by adequate liquidity. In December 2017, Liquid Instruments to Non Core Deposit ratio (AL/NCD) of the banking sector was recorded at 90,48%, or 50% above the threshold. Moreover, excess reserve of banking sector was

Grafik 13

Rasio Likuiditas

Liquidity Ratio



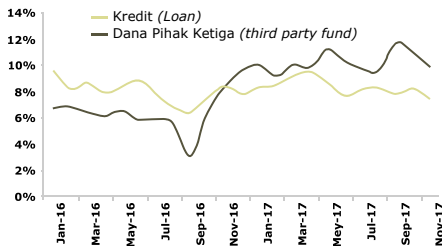
13. Intermediasi lembaga jasa keuangan juga mengalami pertumbuhan yang sejalan dengan kinerja perekonomian domestik. Kredit perbankan pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp4.782 triliun atau tumbuh sebesar 8,35% yoy. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp5.289 triliun

13. Financial intermediaries also grew in line with the growth of domestic economy. Bank loans in 2017 amounted to Rp4.782 trillion, or grew 8,35% yoy. Furthermore, banks' Third Party Funds amounted to Rp5.289 trillion

atau tumbuh 9,35% yoy. Pertumbuhan intermediasi perbankan juga diikuti dengan tren penurunan suku bunga. Sepanjang tahun 2017, suku bunga deposito turun sebesar 65 bps dan suku bunga kredit turun 77bps.

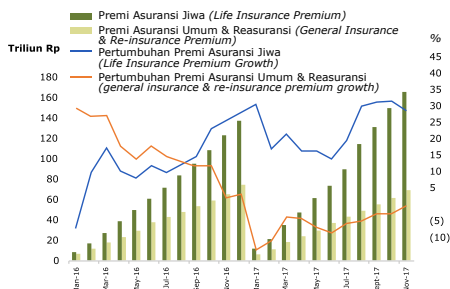
Grafik 14

Intermediasi Perbankan
Banking Intermediaries



Grafik 16

Pendapatan Premi Asuransi
Insurance Companies Premium Income

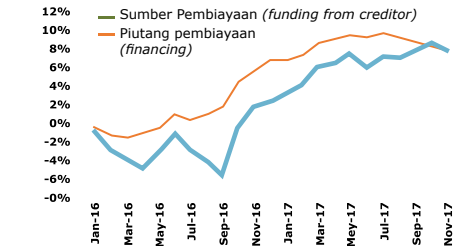


14. Sementara itu, piutang pembiayaan yang disalurkan perusahaan pembiayaan tercatat sebesar Rp415 triliun atau tumbuh 7,05% yoy. Pendapatan premi industri asuransi jiwa dan perusahaan asuransi umum masing-masing sebesar Rp167 triliun dan Rp70 triliun, atau tumbuh masing-masing sebesar 35,10% dan 6,52%.

or grew 9,35% yoy. This improvement of banking intermediaries was followed by the trend of lower interest rates. Throughout 2017, deposit rates went down by 65 bps, while that of lending rates by 77 bps.

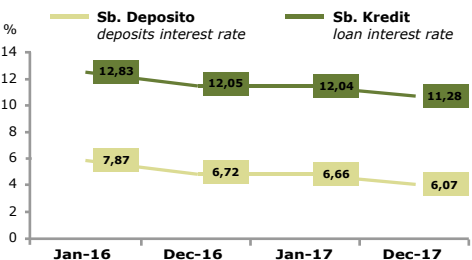
Grafik 15

Intermediasi Perusahaan Pembiayaan
Financing Companies Intermediaries



Grafik 17

Suku Bunga Deposito dan Kredit
Deposit and Loan Interest Rate



14. Meanwhile, financing channeled by multifinance companies was recorded at Rp415 trillion, or grew 7.05% yoy. Income generated from premiums in life insurance and general insurance industries were Rp167 trillion and Rp70 trillion respectively, or increased by 35.10% and 6.52% respectively

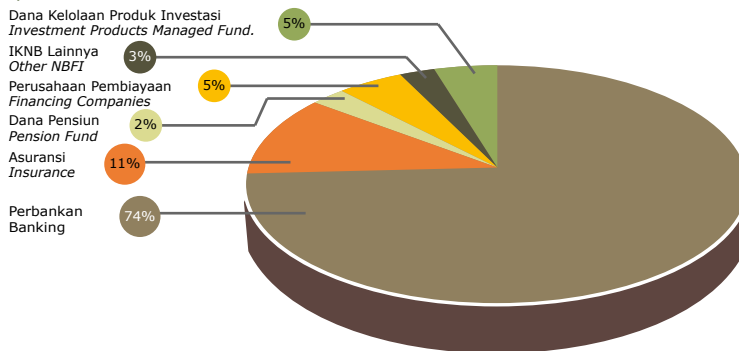
15. Pertumbuhan intermediasi yang berlanjut turut mendorong tumbuhnya total aset lembaga jasa keuangan. Total aset lembaga jasa keuangan tercatat sebesar Rp9.980 triliun per November 2017, atau tumbuh 12,01% yoy. Sektor perbankan masih mendominasi sektor jasa keuangan nasional, dengan aset mencapai 73,69% dari total aset sektor jasa keuangan, atau sebesar Rp7.219,6 triliun untuk Bank Umum dan Rp135,1 triliun untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

15. The continued growth of financial intermediaries contributes to the increased total asset of financial services industry. In November 2017, this total asset was reported to be around Rp9.980 trillion or grew 12.01% yoy. Banking sector continues to dominate the domestic financial services industry, with assets amounting to 73.69% of the total asset of financial services industry, or equals to Rp7,219.6 trillion for commercial banks and Rp135.1 trillion for Rural Banks.

Grafik 18

Komposisi Aset LJK

The Composition of Financial Services Institution Assets



16. Sementara itu, aset Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga terus mencatat pertumbuhan signifikan. Total aset IKNB tercatat sebesar Rp2.133,2 triliun, dengan dominasi aset perusahaan perasuransian sebesar Rp1.136,2 triliun, aset perusahaan pembiayaan sebesar Rp471,5 triliun dan aset dana pensiun sebesar Rp259,6 triliun.

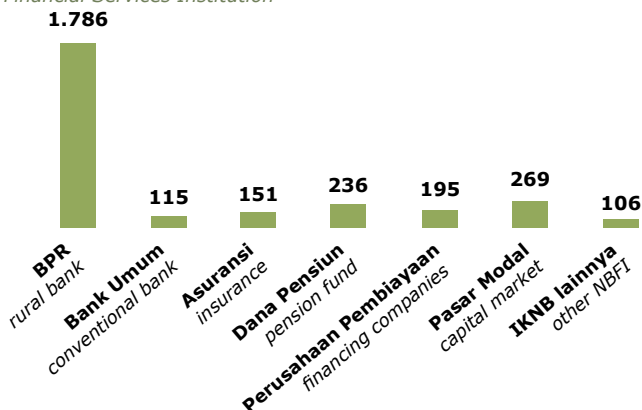
16. Meanwhile, the non-bank financial institutions (NBFIs) continued to register significant development, with total assets amounting to Rp2,133.2 trillion; dominated by insurance companies at Rp1,136.2 trillion, multifinance companies at Rp471.5 trillion and followed by Rp259.6 trillion from pension funds.

17. Dari sisi jumlah lembaga di akhir tahun 2017, terdapat 2.858 Lembaga Jasa Keuangan, yang terdiri dari 115 Bank Umum, 1.786 BPR, 151 Perusahaan Perasuransian, 195 Perusahaan Pembiayaan, 236 Dana Pensiun, dan 106 IKNB lainnya serta 269 institusi di industri Pasar Modal.

Grafik 19

Jumlah LJK

Number of Financial Services Institution



17. In terms of number of financial institutions, a total of 2,858 financial services institutions was recorded at the end of 2017, consisting of: 115 commercial banks; 1,786 Rural Banks; 151 insurance companies; 195 multifinance companies; 236 pension funds; 106 classified as other NBFIs; and 269 institutions belonging to capital market sector.

18. Sepanjang tahun 2017, penghimpunan dana dari pasar modal tercatat Rp264 triliun, yaitu Rp254 triliun melalui penawaran umum yang dilakukan oleh 130 Emiten dan Rp10 triliun dari produk pengelolaan investasi. Apabila dilihat dari pertambahan jumlah emiten saham baru, terdapat penambahan 46 Emiten baru, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2016 (20 emiten). Sesuai dengan kebijakan OJK untuk lebih mengembangkan pembiayaan

18. Moreover, throughout 2017, the fund raised from the capital market registered at Rp264 trillion; in which Rp254 trillion is done through public offering by 130 issuers, and Rp10 trillion through investment management product. There were also 46 new issuers last year, an increase of more than twofold when compared to 2016, which only recorded 20 new issuers. In line with OJK's direction, which is to utilize long-term financing

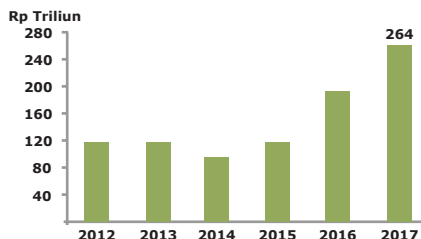
jangka panjang serta melihat perkembangan penghimpunan dana yang cukup menggembirakan di tahun 2017, diharapkan penghimpunan dana melalui pasar modal pada tahun 2018 akan semakin meningkat.

and after witnessing encouraging results in 2017, we are hopeful that fund-raising in capital market will also continue to improve this year.

Grafik 20

Penghimpunan Dana di Pasar Modal

Fund-Raising in Capital Market



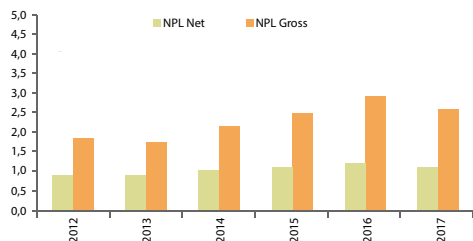
19. Dari sisi risiko, khususnya risiko kredit, dapat dilaporkan bahwa tingkat risiko kredit di sektor jasa keuangan pada tahun 2017 relatif terkendali. Rasio *Non-Performing Loan (NPL) gross* dan *net* perbankan per Desember 2017 tercatat masing-masing sebesar 2,59% dan 1,11%. Sejalan dengan industri perbankan, rasio *Non-Performing Financing (NPF)* perusahaan pembiayaan juga mengalami penurunan menjadi 2,96%.

19. In regard to risk, particularly credit risk in the financial services industry in 2017, we are content to report that it was relatively manageable. The banking Non-Performing Loan (NPL) both gross and net in December 2017 recorded at 2,59% and 1,11% respectively. In conformity with the banking industry, Non-Performing Financing (NPF) of multifinance companies also decreased to 2,96%.

Grafik 21

NPL Gross dan Net Perbankan

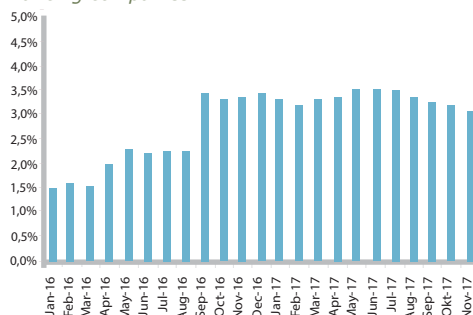
Banking NPL Gross and Net



Grafik 22

NPF Perusahaan Pembiayaan

financing companies NPF



-
20. Langkah lembaga jasa keuangan untuk mengendalikan risiko kredit ini sedikit banyak berpengaruh terhadap moderasi pertumbuhan intermediasi. Namun demikian, dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi dan berakhirnya restrukturisasi yang dilakukan, kami optimis pertumbuhan intermediasi di tahun 2018 akan lebih baik.
21. Kuatnya tingkat permodalan, ketersediaan likuiditas yang memadai, serta terkendalinya tingkat risiko, memberikan landasan yang kuat bagi sektor jasa keuangan untuk lebih proaktif dalam menyediakan sumber pendanaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian domestik. Berdasarkan capaian di atas dan dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% yang ditetapkan Pemerintah di tahun 2018, OJK memperkirakan kredit dan Dana Pihak Ketiga perbankan berpotensi untuk tumbuh di kisaran 10%-12%.
22. Optimisme untuk memacu pertumbuhan turut diperlihatkan pula oleh pelaku industri jasa keuangan, sebagaimana tercermin dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2018, yang menargetkan ekspansi kredit dan Dana Pihak Ketiga masing-masing sebesar 12,23% dan 11,16%.
20. The efforts made by financial services industry to keep the credit risk in check has somewhat affected the moderate growth of intermediaries. Nevertheless, with the improved economy and the conclusion of the ongoing restructuring process, we are optimistic that the performance of financial intermediaries will improve in 2018.
21. Strong capital, adequate liquidity, and manageable risks have contributed to the strong foundation for financial services sector that enables it to be more proactive in providing source of fund to stimulate the growth of our domestic economy. With the abovementioned achievements and the 5.4% Government's target for economic growth in 2018, OJK estimates the banks' credit growth and Third Party Funds can potentially increase to reach 10% - 12%.
22. The same optimism to accelerate growth has also been shared by the financial services industry, demonstrated by their business plan for 2018, which sets the target for credit expansion at 12.23% and Third Party Funds growth at 11.16%.
-

***Bapak Presiden yang kami
muliaikan dan hadirin sekalian,***

23. Namun, di tengah capaian-capaian tersebut, kami melihat masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi untuk dapat merealisasikan momentum percepatan pertumbuhan.
24. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kami melihat akan terdapat perubahan mendasar terhadap struktur permintaan produk dan jasa, di mana akan terjadi pergeseran peningkatan permintaan terhadap produk dan jasa yang memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Pergeseran ini menuntut dilakukannya modernisasi kemampuan industri di Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada produk-produk sederhana dan berbasis komoditas.
25. Untuk dapat melakukan modernisasi industri dan mempercepat program industrialisasi di Indonesia, maka diperlukan sumber permodalan atau pembiayaan untuk proyek-proyek jangka panjang di sektor-sektor prioritas, termasuk modal atau pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur.
26. Berkenaan dengan hal tersebut, maka salah satu kebijakan strategis yang akan diambil OJK untuk sektor jasa keuangan di tahun 2018 ini adalah terkait dengan upaya memfasilitasi penyediaan

***Your Excellency, esteemed
ladies and gentlemen,***

23. Despite all the achievements, we still see some challenges that need to be addressed in order to materialize the accelerated growth and to keep the momentum.
24. In line with the growth of our economy, we foresee that there will be a fundamental change in the demand for products and services, in a way that there will be a rise in demand for more complex products and services. This shift requires modernization and improved capability on the part of Indonesian industry that currently relies on uncomplicated and commodity-based products.
25. To be able to carry out the work of industry modernization and to accelerate industrialization program in Indonesia, source of capital is needed to finance long-term projects in priority sectors, including financing for infrastructure.
26. In this regard, OJK has made it one of its strategic priorities for 2018 to facilitate long-term financing

pembiayaan yang bersifat jangka panjang untuk mendukung aktivitas investasi yang diperlukan bagi perekonomian, khususnya pembangunan infrastruktur.

to support investment activities that are of paramount importance for our economy, particularly infrastructure development.

27. Dalam upaya untuk memfasilitasi penyediaan pembiayaan jangka panjang, kami melihat peran pasar modal ke depan akan semakin penting. Pengembangan instrumen-instrumen investasi jangka panjang, ketersediaan likuiditas yang cukup, serta ketersediaan infrastruktur penunjang di pasar modal merupakan beberapa area prioritas yang akan didorong untuk dapat direalisasikan pada tahun 2018.
 28. Salah satu upaya yang akan ditempuh untuk meningkatkan peran pasar modal di tahun 2018 sebagai sumber pendanaan bagi dunia usaha, adalah dengan mengeluarkan kebijakan penyederhanaan persyaratan dokumen dan alur proses bagi perusahaan dalam penyampaian pernyataan pendaftaran penawaran umum Efek bersifat utang dan sukuk, di mana penawaran umum tersebut hanya ditujukan kepada pemodal profesional (institusional dan besar).
 29. Terkait dengan instrumen pembiayaan, kami akan memperluas dan meningkatkan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang lebih bervariasi antara lain *perpetual bonds*, *green bonds*, dan obligasi daerah, termasuk penerbitan ketentuan pengelolaan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui skema Kontrak Investasi Kolektif.
27. In our attempt to facilitate the long-term financing, we envisage that the role of capital market will be increasingly important. As such, instruments for long-term investment, adequate liquidity, as well as necessary infrastructure support in the capital market sector are a few prioritized areas that we encouraged to be realized in 2018.
 28. Part of the effort to enhance the role of capital market as an alternative source of financing for businesses this year is to issue regulations that will simplify the requirements for documents and business process for companies declaring their plans for initial public offering, through bonds and sukuk issuance, targeting only qualified institutional investors.
 29. With regard to the financing instruments, we will expand and further utilize the instruments so as to include more variety of instruments such as perpetual bonds, green bonds and municipal bonds, including fund management related to Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) through collective investment contracts.

30. Kami juga akan mendorong penerbitan obligasi daerah yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di wilayahnya masing-masing. Dengan kesiapan beberapa Pemda untuk menerbitkan obligasi daerah, Kami berharap akan ada obligasi daerah yang terbit pertama kali di tahun 2018 ini.

31. Dalam rangka memberikan stimulus meningkatkan sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan perubahan iklim (*climate change*), OJK akan memfasilitasi diterbitkannya Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bonds*).

32. Untuk mempermudah dan meningkatkan keterbukaan proses penawaran umum, OJK juga akan melakukan modernisasi dan percepatan proses Penawaran Umum melalui *Electronic Registration* (e-Reg) serta menerapkan *Electronic Book Building* (e-Book Building). Pelaksanaan proses *e-Book Building* diharapkan dapat memperbesar partisipasi investor ritel di masa yang akan datang. Selain itu, dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian transaksi di bursa efek, OJK akan mendorong implementasi percepatan penyelesaian transaksi di bursa efek dari yang semula T+3 menjadi T+2.

30. In addition, we would also encourage the issuance of municipal bonds, which we believe could be utilized by the Regional Governments as an alternative source of financing for infrastructure projects in their respective regions. Considering that there is a number of Regional Governments that are ready to issue, we are hopeful that there will be some issuances of municipal bonds this year.

31. In our effort to stimulate the long-term financing to support the sustainable development, in line with the country's efforts to attain the Sustainable Development Goals (SDGs) and Climate Change initiatives, OJK will facilitate the issuance of Green Bonds.

32. In addition, for the purpose of easing the process and promoting disclosure of public offerings, OJK will modernize and accelerate the public offering process through Electronic Registration (e-Reg) and the implementation of Electronic Book Building (e-Book Building). The use of e-Book Building is aimed at broadening the retail investor base in the future. Additionally, to promote efficiency in stock exchange transactions, OJK will expedite the transaction process from what was originally three days (Transaction Day+3 or T+3) to two days (Transaction Day+2 or T+2).

33. Peran IKNB juga akan lebih dioptimalkan dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Dapat dikemukakan bahwa lembaga pembiayaan (perusahaan pembiayaan infrastruktur dan perusahaan pembiayaan) per November 2017 telah menyalurkan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp56,3 triliun, di antaranya digunakan untuk pembiayaan pembangunan pembangkit tenaga listrik (Rp31,8 triliun), pembangunan jalan tol (Rp12,7 triliun) serta pembangunan proyek sistem penyediaan air minum dan pengembangan Palapa Ring (Rp11,8 triliun). Kami optimis kontribusi lembaga pembiayaan ini akan terus meningkat di tahun 2018.
34. Untuk meningkatkan peran IKNB dalam pembangunan infrastruktur, khususnya dalam memitigasi risiko yang muncul selama proses pembangunan, masa pemeliharaan, dan penggunaan proyek, OJK juga akan mendorong keterlibatan perusahaan penjaminan dan asuransi dalam menyediakan produk-produk penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur guna memberikan kepastian terhadap pembayaran kepada kontraktor maupun investor.
35. Sementara itu, perusahaan asuransi dengan produk *Construction All Risk* dapat memberikan jaminan dalam hal terjadi kerusakan, tuntutan pihak ketiga,
33. To complement the efforts on supporting the infrastructure development, the role of NBFIs also needs to be optimized. It was reported that infrastructure financing companies together with multifinance companies channeled Rp56.3 trillion of funds (per November 2017) to finance infrastructure projects, including electricity projects (Rp31.8 trillion); toll roads (Rp12.7 trillion); water system and Palapa Ring satellite development projects (Rp11.8 trillion). We are positive that the multifinance companies will continue to increase their contribution to the development of infrastructure this year.
34. In order to increase the NBFIs' role in infrastructure development, particularly in mitigating the risks related to the development phase, maintenance phase, as well as operational phase, OJK will encourage guarantee and insurance companies' participation to offer their products to support infrastructure projects, in order to assure repayment to both contractors and investors.
35. Further, insurance companies offering Construction All Risk Insurance could also provide coverage for damages, third party lawsuits,

kecelakaan kerja, serta kerugian bangunan akibat ketidaksesuaian kondisi di perjanjian selama proses pembangunan. Kami juga meminta kesiapan dari industri asuransi untuk mampu menyediakan produk asuransi Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian,

36. Salah satu prasyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah dengan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah dan kecil. Sektor jasa keuangan dapat berperan dalam kegiatan ini melalui penyediaan layanan keuangan formal termasuk permodalan bagi masyarakat menengah dan kecil. Dengan meningkatkan inklusi keuangan dan keterlibatan masyarakat pada sektor keuangan secara formal, maka sektor jasa keuangan akan dapat meningkatkan perannya dalam membantu terciptanya pemerataan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

workplace accidents, as well as loss or damages during project development arising from contract inconsistencies. We would also urge the insurance industry to improve its preparedness to enable itself to insure State Properties or Barang Milik Negara (BMN) as stipulated in the relevant Finance Minister's Decree No. 247/PMK.06/2016 regarding State Properties Insurance.

Your Excellency, esteemed ladies and gentlemen,

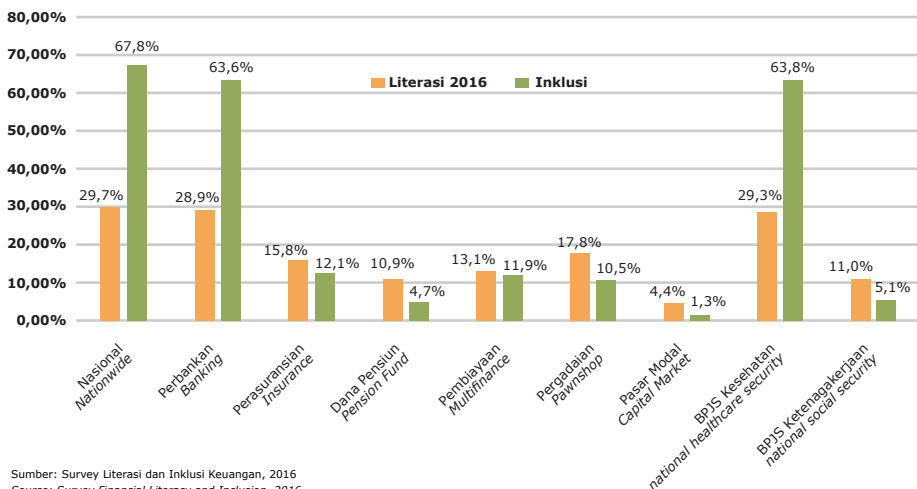
36. One of the prerequisites to attaining Sustainable Development Goals is to create equitable growth in all levels of society, particularly the medium and low-income society. Financial services sector could play a bigger role in these activities through providing formal financial services, including the necessary financing to the medium and low-income society. Through enhancing financial inclusion and increasing community participation in providing formal financial services, financial services sector will act as a catalyst in materializing equitable economy and in increasing welfare of the Indonesian society.

37. Meskipun telah mengalami perbaikan dalam dua tahun terakhir ini, kami mencermati bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia baru tercatat masing-masing sebesar 29,7% dan 67,8%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ruang yang cukup luas bagi upaya peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan bagi seluruh kalangan masyarakat di semua penjuru tanah air, khususnya lapisan masyarakat kecil. Seiring dengan hal tersebut, di tahun 2018 ini OJK akan kembali mendorong peran sektor jasa keuangan untuk meningkatkan ketersediaan akses keuangan bagi lapisan masyarakat yang masih dianggap tidak "bankable".

37. Although there have been some notable improvements in the past two years, we noticed that the level of financial literacy and financial inclusion for Indonesian population were, at 29.7% and 67.8% respectively. This shows that there is an ample room for growth for efforts to increase access to financial products and services for all segments of population across Indonesia, particularly the low-income segment. In line with this, OJK will continue to urge financial services sector to step up to the plate in providing access to finance for the unbankables.

Grafik 23

Tingkat Literasi Dan Inklusi Keuangan Berdasarkan Sektor Industri
Financial Literacy and Inclusion by Sector



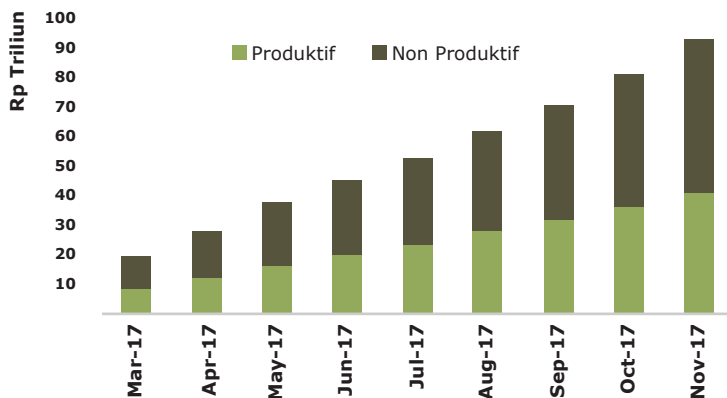
Sumber: Survey Literasi dan Inklusi Keuangan, 2016
Source: Survey Financial Literacy and Inclusion, 2016

38. Dalam upaya untuk mendorong akses keuangan, khususnya dari sisi pembiayaan usaha produktif, OJK akan mengembangkan program untuk mengembangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui program KUR Klaster. Melalui program ini, penyaluran kredit KUR akan diiringi dengan pendampingan dan pemasaran produk yang dilakukan oleh perusahaan inti, baik perusahaan BUMN, BUMDes/BUMADes maupun swasta. Selain itu, untuk meningkatkan keterlibatannya, Pemda provinsi maupun kabupaten kota juga akan ikut dilibatkan secara aktif dalam pembinaan penerima kredit KUR. Terkait hal tersebut, kami mengharapkan dukungan Bapak Presiden agar program KUR Klaster ini dapat menjadi program Nasional dengan melibatkan Pemda.

38. In an effort to enhance access to finance, particularly for financing productive businesses, OJK will expand the People Business Credit Program (KUR) through KUR Cluster program. Through this program, the credit channeling will be coupled with pairing-up/coaching/mentoring and product marketing programs, carried out by the core institutions, be it State-Owned Enterprises (BUMN), Village-Owned Enterprises or Intra Village-Owned Enterprises (BUMDes/BUMADes), or private enterprises. Additionally, to increase its participation, Regional Governments will also be actively involved in training programs for KUR credit recipients. In this regard, we kindly seek His Excellency's support in making this KUR Cluster program a national program, with active participation of regional governments.

Grafik 24

Perkembangan KUR KUR Development



Sumber: Kemenko

39. OJK juga akan memperluas pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah "Bank Wakaf Mikro" (LKMS) di beberapa pesantren yang tersebar di berbagai daerah. Dapat kami kemukakan bahwa skema pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro yang akan dikembangkan adalah pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp3 juta, margin yang dikenakan setara 3%, serta diberikan kepada kelompok dengan anggota 5 orang yang diiringi dengan program pemberdayaan dan pendampingan. Program ini kami yakini akan sangat membantu masyarakat kecil serta usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitasnya. Saat ini telah diinisiasi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah "Bank Wakaf Mikro" (LKMS) di beberapa pesantren, dengan *pilot project* 20 LKMS (11 sudah beroperasi, 9 dalam proses perizinan) yang tersebar di berbagai daerah. Pengembangan LKMS ini diharapkan juga dapat mempercepat akselerasi pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan.

39. OJK will also amplify Shari'a Microfinance Institutions (or Bank Wakaf Mikro/LKMS) in various Islamic boarding schools dispersed all over Indonesia. The financing scheme for these Shari'a Microfinance Institutions, is as follow : acollateral-free loans given to a group of people, with maximum amount of Rp 3 million, using 3% interest rate margin, coupled with empowerment and mentorship programs. We trust that this program will help the low-income groups as well as micro and small enterprises increase their capacity and productivity. We have initiated this Bank Wakaf Mikro/LKMS program at several Islamic boarding schools, with 20 LKMS across Indonesia participating in the pilot project (11 of them are operational; whereas 9 are in the application process). This program is also expected to spur the development of shari'a-based economy in the country.

Peta Sebaran LKMS

Map of Sharia based Microfinance Institutions



40. Dalam rangka meningkatkan akses bagi investor domestik di pasar modal serta mendorong keterlibatan pelaku ekonomi khususnya lembaga jasa keuangan dan profesional di daerah, termasuk potensi penciptaan lapangan kerja di daerah, OJK akan mengeluarkan kebijakan mengenai pendirian Perusahaan Efek Daerah. Dengan adanya Perusahaan Efek Daerah, diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan-perusahaan di daerah, terutama terkait akses pendanaan melalui pasar modal.

41. Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen OJK dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan perubahan iklim, OJK telah membuat pengaturan mengenai keuangan berkelanjutan. Sebagai pelengkap pengaturan tersebut, koordinasi antar lembaga/kementerian terkait juga harus ditingkatkan. Kami akan menginisiasi dibentuknya Komite Nasional Keuangan Berkelanjutan yang bertugas untuk menyusun Strategi Nasional Keuangan Berkelanjutan. Kami juga akan mengoptimalkan sumber pendanaan swasta termasuk menggali model pembiayaan "*blended finance*" serta optimalisasi peran BUMDes/BUMADes untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

40. In an attempt to increase access for domestic investors in the capital market, as well as to enhance participation of economic agents, particularly financial services institutions and regional entrepreneurs, including increasing possibility of job creation in the regions, OJK will issue regulations related to establishment of Regional Securities Companies. With the establishments of Regional Securities Companies, access to finance –particularly in capital market– is expected to be enhanced, and thereby will empower the regional enterprises.

41. Moreover, as part of OJK's ongoing commitment in attaining the Sustainable Development Goals and Climate Change initiatives, OJK has issued regulations relevant to sustainable finance. To complement these regulations, we feel that coordination among relevant ministries and agencies would need to be enhanced. Subsequently, we will initiate the establishment of National Committee for Sustainable Finance, which will be tasked to draft National Strategy for Sustainable Finance. We would also optimize private sector sources, including tapping into "*blended finance*" models, and strengthen the role of Village-Owned Enterprises and Inter Village-Owned Enterprises (BUMDes/BUMADes) to support inclusive economic growth.

42. Upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan di atas harus disertai dengan langkah-langkah untuk meningkatkan literasi keuangan maupun perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena itu, OJK di tahun 2018 akan mengembangkan berbagai model edukasi keuangan yang bersifat *high impact* dengan hasil yang optimal dan terukur, dengan memanfaatkan berbagai *delivery channel*. Program edukasi ini juga akan bersifat inklusif sehingga mampu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan yang berkedok investasi.
43. Keseluruhan program kebijakan ini akan kami monitor melalui optimalisasi fungsi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), saat ini telah berdiri 61 TPAKD baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Peningkatan efektivitas TPAKD terutama dilakukan dalam hal mendorong pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi daerah melalui penguatan sektor jasa keuangan. Komitmen dan dukungan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri jasa keuangan, perlu terus ditingkatkan dalam upaya percepatan akses keuangan di daerah. Selain itu, peran Satgas Waspada Investasi juga akan terus dioptimalkan perannya dalam upaya mencegah dan menindak kegiatan investasi ilegal yang merugikan masyarakat.
42. These efforts to enhance financial inclusion need to be coupled by steps to improve financial literacy and consumer protection. Therefore, this year OJK will expand a number of financial education models, which are believed to be high impact, with optimum and measureable results, using various delivery channels. This education program will also be inclusive, and as such, is hoped to protect consumers from investment scams.
43. The program as a whole will be monitored by Teams for Acceleration of Regional Financial Access (TPAKD); currently 61 Teams have been established, at provincial, district, and city levels. The improved efficacy of the TPAKD was done mainly to boost regional leading sectors and to explore regional economies through strengthening financial services sector. In our efforts to accelerate regional financial access, strong commitment and support from all stakeholders, especially in the financial services sector, need to be continuously ensured. Equally important, the role of Investment Alert Taskforce will be strengthened, to prevent and cease illegal investment scams that could harm public.

**Bapak Presiden yang kami
muliaikan dan hadirin sekalian,**

44. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita telah melihat bagaimana layanan keuangan berbasis digital (FinTech) telah mewarnai perkembangan industri jasa keuangan Indonesia. OJK melihat bahwa *FinTech* merupakan sebuah fenomena yang dalam waktu singkat akan mengakselerasi tingkat penggunaan layanan keuangan berbasis digital dan secara fundamental akan mengubah peta industri jasa keuangan ke depan.
45. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga terkemuka dunia, dijelaskan bahwa risiko kehilangan segmen usaha bagi industri perbankan akibat munculnya *FinTech* diperkirakan akan mencapai 28% secara global sampai dengan tahun 2020, sementara, untuk lembaga keuangan non-bank diperkirakan mencapai 22% sampai dengan tahun 2020. Secara lebih spesifik, segmen usaha yang diperkirakan akan sangat terpengaruh oleh munculnya *FinTech* adalah segmen *consumer banking dan fund transfers & payments*.
46. Dapat kami sampaikan bahwa OJK telah mengeluarkan peraturan *FinTech* pertama kali di Indonesia, yang mampu mendorong pertumbuhan *FinTech Peer-to-Peer (P2P) Lending* di Indonesia.

**Your Excellency, esteemed
ladies and gentlemen,**

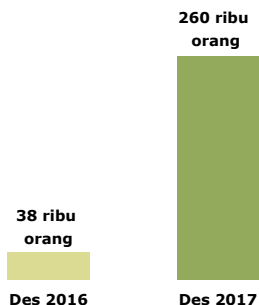
44. Turning into digital financial services, for the past few years, we saw how digital-based financial services have enriched the development of financial services in Indonesia. OJK is of the view that Financial Technology (*FinTech*) will quickly accelerate the use of digital-based financial services, and will bring about fundamental changes in our financial services industry in the near future.
45. A survey done by a global firm pointed out that the risk of business loss suffered by the banking sector due to emergence of *FinTech* will reach 28%, globally, up to 2020; whereas for the NBFIs the loss was predicted to reach 22%, also up to 2020. Specifically, it was predicted that businesses that will be most affected by the emergence of *FinTech* are consumer banking, as well as fund transfers and payments segment.
46. Let me also use this opportunity to report that OJK has issued Indonesia's first regulation on *FinTech*, which is hoped to boost the development of *FinTech's Peer-to-Peer Lending* in Indonesia.

Saat ini sudah ada 30 perusahaan *FinTech P2P Lending* yang terdaftar/berizin di OJK, dan 36 perusahaan dalam proses pendaftaran. Total pembiayaan bisnis *FinTech* ini telah mencapai Rp2,6 triliun dengan 259.635 peminjam.

As of now, 30 FinTech P2P Lending have been registered/licensed, and 36 more are in the pipeline. Further, total financing generated from the FinTech business has reached Rp2.6 trillion, with 259.635 borrowers

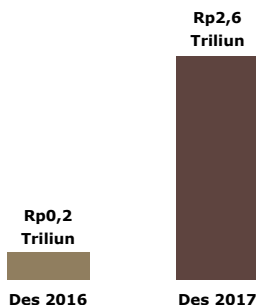
Grafik 25

Jumlah Peminjam
Amount borrowed



Grafik 26

Jumlah Nilai Pembiayaan
Amount borrowed



47. Ke depan, untuk mempersiapkan industri keuangan dalam menyambut peluang maupun tantangan yang akan muncul dari *FinTech* kami akan terus mendukung inovasi produk teknologi di sektor jasa keuangan selama produk tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan tetap dalam koridor tata kelola yang baik berdasarkan asas TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness*) agar aspek perlindungan nasabah terpenuhi.
47. In the future, to increase the financial services industry's preparedness in welcoming the opportunities and challenges arising from FinTech, we will continue to support product and technology innovations in the financial sector, so long as they are beneficial and adhere to good governance based on Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness (TARIF) to ensure consumer protection.
48. Untuk itu, OJK di tahun 2018 akan menginisiasi program-program di antaranya:
48. For these reasons, OJK will initiate the following programs, among others, this year:

- a. meningkatkan regulasi industri FinTech Lending yang efektif dalam rangka perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan yang bebas dari praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- b. mendorong terciptanya ekosistem *FinTech P2P Lending* di Indonesia antara lain meliputi *E-KYC, Credit Scoring, Digital Signature, dan E-Stamp* untuk meningkatkan kecepatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna, termasuk penerapan *regulatory sandbox*;
- c. mendorong kerja sama *FinTech P2P Lending* dengan lembaga jasa keuangan lainnya seperti perbankan, pasar modal, dan lembaga pembiayaan;
- d. mensosialisasikan Pendanaan Gotong Royong *On-Line* kepada masyarakat di berbagai daerah dalam rangka mendorong *financial inclusion* dan *financial deepening*;
- e. mendorong peran *FinTech Lending* dalam mendukung program Pemerintah antara lain penjualan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel secara *on-line* dan penyaluran dana bergulir melalui kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

- a. to improve effective regulations for FinTech Lending that will promote consumer protection and maintain stability of our financial system, as well as ensure that Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) principles are adhered to;
- b. to spur the creation of ecosystem of FinTech P2P Lending in Indonesia, which includes: e-KYC (Know Your Customers), Credit Scoring, Digital Signature, and e-Stamp, all for the purpose of expediting the process, improving security and convenience of users, including implementation of regulatory sandbox;
- c. to urge the cooperation between FinTech P2P Lenders and other financial services institutions such as banking, capital market and hNBFIs;
- d. to socialize the online crowdfunding to the public in an effort to enhance financial inclusion and financial deepening;
- e. to urge the FinTech Lending companies to take part in an online Government Retail Bonds as well as distribution of revolving funds, through cooperation with related ministries and agencies.

49. Selain itu, OJK juga akan menerbitkan *roadmap* pengembangan inovasi digital untuk dapat digunakan sebagai panduan pengembangan dan pengaturan *FinTech*. Dalam konteks ini diharapkan lembaga jasa keuangan ke depan dapat meningkatkan sinergi dengan membuka peluang bagi lembaga jasa keuangan, untuk berperan sebagai investor bagi perusahaan *FinTech* ataupun mendirikan lini usaha *FinTech*.

Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian

50. Faktor lain yang akan menjadi perhatian kami di tahun 2018 ini adalah terkait dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing industri jasa keuangan Indonesia. Apabila melihat perkembangan pasar keuangan ke depan yang mengarah pada integrasi pasar keuangan secara global, tidak mungkin kita justru mengambil langkah yang melawan arus globalisasi yang terjadi tersebut. Oleh karena itu, kita juga perlu melihat kembali kemampuan lembaga jasa keuangan domestik untuk memanfaatkan peluang-peluang yang muncul, baik dari sisi kelembagaan maupun kemampuan lembaga jasa keuangan untuk berkompetisi.

49. Additionally, OJK will issue a roadmap for development of digital innovations to be used as guidance for FinTech development and regulation in Indonesia. In this context, it is hoped that financial services industry and FinTech companies could work together in synergy, and that financial services industry could tap the potential of FinTech by becoming investors of FinTech companies, or even creating a new line of business in FinTech.

Your Excellency President, distinguished ladies and gentlemen,

50. Another factor that will be our focus in 2018 is how to increase efficiency and competitiveness of our financial services industry. When we observe the trends, market development in the future will be leaning towards global economic integration; and hence, it would be futile to take a step in the opposite direction. Therefore, we need to assess the preparedness of our domestic financial services institutions, from the institutional or capability standpoint, to seize the opportunities that emerged and to compete effectively.

51. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK akan melanjutkan upaya menciptakan industri keuangan yang lebih efisien antara lain dengan mendorong konsolidasi jumlah bank umum dan BPR melalui penggabungan (*merger*) dan peleburan terutama yang dimiliki oleh pihak yang sama. OJK akan segera menyempurnakan ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan lembaga jasa keuangan serta pengambilalihan perusahaan terbuka.

52. Upaya konsolidasi melalui penggabungan (*merger*) dan peleburan (konsolidasi) jumlah lembaga keuangan non-bank juga akan ditempuh diiringi dengan reformasi pengaturan dan pengawasan yang akan lebih didasari prinsip pengaturan dan pengawasan berbasis risiko.

53. OJK juga akan segera menerbitkan dasar pengaturan untuk pembentukan Lembaga Pendanaan Efek untuk mendukung transaksi efek. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar, menyediakan infrastruktur yang terpusat untuk kegiatan Pendanaan Efek, serta menyediakan fasilitas bagi kegiatan Pendanaan Efek yang lebih transparan, sehingga lebih mudah dalam pengawasan dan manajemen risikonya.

51. In this relation, OJK will continue to create a more efficient financial services industry, by way of consolidating financial services institutions, including commercial banks, Rural Banks and NBFIs, through mergers and consolidations, particularly if owned by the same parties. OJK will also improve its regulations on mergers, acquisitions, and takeover of financial services institutions, as well as takeover of public companies.

52. The same strategy will also be applied to NBFIs industry. Consolidation efforts through mergers and consolidations will be implemented, with regulatory reforms and strengthened risk-based supervision.

53. OJK will also issue regulatory framework for establishing the Securities Financing Institution to support securities transactions. The establishment of this institution is aimed to increase liquidity and market stability, creating a centralized infrastructure for securities financing transactions, as well as to facilitate securities financing in a more transparent manner, to help with the supervision and risk management.

Salah satu upaya penguatan manajemen risiko adalah dengan penggunaan biro kredit dalam pendanaan transaksi efek.

Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian,

54. Di tengah upaya-upaya untuk terus memacu pertumbuhan ini, kami juga tetap tidak akan melupakan tujuan pembentukan OJK, yaitu untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Kami akan tetap fokus untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan secara efektif dan komprehensif. Kami akan terus meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan dengan mendasarkannya pada *best practices internasional* yang telah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sektor jasa keuangan Indonesia.
55. Dari sisi perbankan, OJK akan melakukan *revisi* kerangka sekuritisasi sesuai Basel III dan menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10% untuk transaksi *hedging* nilai tukar. OJK juga akan menerbitkan kebijakan mengenai pengelolaan risiko konsentrasi di bank atas eksposur besar (*large exposure*) yang sesuai kerangka Basel III dengan menyesuaikan perhitungan batas maksimum pemberian kredit oleh bank umum kepada pihak tidak terkait bank. Tujuan pengaturan ini diharapkan memperkuat manajemen risiko bank dalam penyediaan dana dan meningkatkan kehati-hatian bank dalam mengelola konsentrasi portofolio penyediaan dana.

One way to strengthen risk management is to utilize credit reporting bureaus in securities financing.

Your Excellency, esteemed ladies and gentlemen,

54. In the midst of continuous efforts to stimulate growth, we always keep in mind OJK's mission, namely to maintain the stability in our financial system. Please be assured that we will constantly focus on regulating and supervising financial services sector in an effective and comprehensive manner. We will also continue to improve the quality of our regulations and follow international best practices that are suitable to Indonesia's needs and conditions.
55. In the banking sector, OJK will revise the framework of securitization in line with Basel III principles and release the obligation to provide 10% margin for qualified currency hedging transaction. Further, OJK will also issue regulations on concentration risk management in banks on large exposures, aligned with Basel III framework, by adjusting the legal lending limit to unrelated borrowers. The objective of this rule is hoped to strengthen banks' risk management in providing funds and improve banks' prudential aspects in

56. Untuk meningkatkan kesetaraan dalam penegakkan hukum di sektor jasa keuangan, OJK juga akan mengeluarkan kebijakan terkait *Una Via Principle* yang mengatur kewenangan OJK untuk melakukan penegakan hukum pidana di bidang pasar modal dengan memilih alternatif menggunakan jalur hukum administratif atau hukum pidana.

57. Sebagai salah satu pilar utama di industri jasa keuangan, OJK dan seluruh pihak yang diawasinya harus dapat bekerja sama dalam menegakkan nilai-nilai *good governance*. Implementasi *governance* yang efektif akan mendorong industri jasa keuangan yang sehat dan terus tumbuh berkesinambungan. OJK mendorong pelaksanaan *governance* di industri jasa keuangan di antaranya melalui peningkatan peran profesi di bidang *governance, risk management, and compliance* (GRC). Komunikasi OJK dan organisasi/asosiasi profesi bidang GRC akan ditingkatkan secara lebih intensif untuk menghasilkan *output* yang lebih riil.

Bapak Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian,

56. In order to attain equality in law enforcement in the financial sector, OJK will issue policy related to *Una Via Principle*, which governs OJK's mandate to uphold criminal law in the capital market sector, by choosing whether to impose administrative or criminal sanctions.

57. As one of the main pillars in the financial industry, OJK will work together with industry under its supervision to uphold the principles of good governance. Effective implementation of governance will encourage a hearty the industry that grows in a sustainable manner. OJK urges the implementation of good governance in the financial services industry, by way of enhancing the role of professionals in the area of governance, risk management, and compliance (GRC). Communications between OJK and organizations/associations of professionals in GRC field will be intensified to ensure concrete outcomes.

Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen,

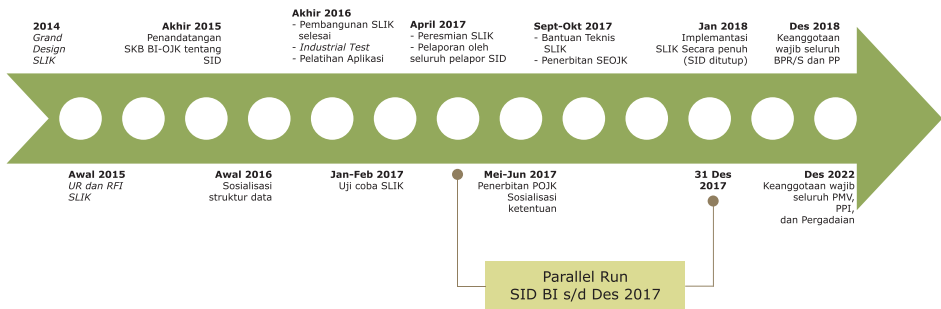
58. Untuk menjalankan salah satu mandat utama OJK untuk melaksanakan pengawasan secara terintegrasi, di tahun 2018 ini akan mengembangkan mekanisme pengawasan terintegrasi dengan mendorong konglomerasi keuangan untuk memperhatikan faktor risiko dalam menilai risiko konglomerasi keuangan yang signifikan tidak hanya yang berasal dari perusahaan jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan, namun juga yang berasal dari perusahaan non-jasa keuangan. Seiring dengan hal tersebut OJK juga akan melakukan kegiatan *surveillance* dan *business review* terhadap entitas non-jasa keuangan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali dari suatu konglomerasi keuangan.
59. Dari sisi pengaturan, OJK juga akan mulai mengharmonisasi berbagai ketentuan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB, dengan melakukan *review* atas berbagai peraturan yang saling terkait di ketiga sektor tersebut. Terkait dengan hal ini, OJK juga akan mewujudkan perizinan “satu pintu” sehingga dapat lebih mempercepat proses perizinan dan mempermudah industri keuangan dalam berinovasi dan tentunya akan lebih hemat biaya.
60. Pada 1 Januari 2018, OJK secara penuh telah mengimplementasikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan penyempurnaan Sistem Informasi Debitur (SID)
58. In order to carry out one of OJK’s main mandates, namely integrated supervision, this year we will develop integrated supervision mechanism through urging financial conglomeration group to consider risk factors that are classified as significant, in assessing financial conglomeration risks; and not only risks associated with financial institutions, but also the non-financial institutions within the wider conglomeration group. In line with this, OJK will conduct surveillance activities and business reviews on the non-financial entities owned by controlling shareholders of financial conglomeration groups.
59. On the regulation, OJK will conduct harmonization of regulations –stemmed from banking, non-banking and capital market sectors—by reviewing regulations that are connected to the three sectors. In this regard, OJK will create a “one-stop license” unit to promote acceleration of licensing process, and to accomodate innovation in financial industry and certainly, to make it cost effective.
60. On the first of January, 2018, OJK has fully implemented the Financial Information Services System (SLIK), which was an improved version of the Debtor Information System (SID),

yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia. SLIK merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk memitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Selain itu, keberadaan SLIK mampu mendukung perluasan akses kredit/pembiayaan.

which was managed by Bank Indonesia. SLIK is one of the most important infrastructures in the financial services sector, which could be used by industry to mitigate the risks, particularly credit risks, in a way that it could help lower bad-debt loans. In addition, SLIK could also help broadening credit or financing access.

Tabel 2

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
Financial Information Services System (SLIK)



61. Dibandingkan sistem sebelumnya SLIK memiliki beberapa kelebihan, antara lain: (1) cakupan pelapor SLIK sangat luas dan beragam, meliputi lembaga jasa keuangan dan lembaga non-jasa keuangan; serta

61. Compared with the previous system, SLIK has a few advantages, which includes: (1) SLIK users are wider and diversified, covering financial services institutions and non-financial services institutions; and

(2) infrastruktur, teknologi dan database yang lebih baik, sehingga cakupan informasi lebih lengkap, mekanisme pelaporan lebih sederhana dan terpusat, akses lebih mudah, serta respons terhadap permintaan informasi debitur lebih cepat.

62. Untuk dapat mendukung insiatif-inisiatif ini Kami juga melakukan beberapa langkah penyempurnaan internal organisasi. Salah satu upaya ini adalah dengan meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas OJK dalam mengawasi sektor jasa keuangan melalui penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Selain itu, Kami juga akan melakukan transformasi organisasi pengawasan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengaturan khususnya di pengawasan industri keuangan non-bank.

Bapak Presiden yang Kami muliakan dan hadirin sekalian,

63. Demikian yang dapat Kami sampaikan. Semoga kita dapat mengisi tahun 2018 ini dengan capaian yang jauh lebih baik dari tahun lalu. Dengan perkembangan ekonomi dan sektor jasa keuangan yang positif, Kami mengajak seluruh pelaku di industri jasa keuangan untuk membangun optimisme bersama dan tidak hanya menunggu atau bersikap pasif, namun lebih proaktif dan siap untuk berupaya memacu pertumbuhan.

(2) infrastructure, technology, and improved database, to ensure more sufficient information, simplified and centralized reporting mechanism, easier access, and faster response time for information request on debtor.

62. In order to support these initiatives, we also took steps to improve our internal organization. One of these is by improving efficiency in carrying out OJK's duties in supervising financial services sector through intensifying the use of information technology. As well, we will also conduct organization transformation for our supervisors to improve the quality of our supervision and regulatory function, particularly in the NBFIs supervision.

Your Excellency, esteemed ladies and gentlemen,

63. Let me conclude my remarks with a hope to fill this year of 2018 with more improved achievements. Given the positive economic and financial services development, let me urge all of you in the financial services industry to build mutual optimism, and not wait around or be complacent, but be more proactive and eager to stimulate the growth of this country.

64. Selanjutnya, Kami mohon perkenan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan arahan terkait kebijakan pengembangan sektor jasa keuangan ke depan, sehingga keberadaannya lebih bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

65. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati upaya yang kita lakukan.

64. After this, may I humbly request Your Excellency, the President of the Republic of Indonesia, to kindly provide us with his wisdom and guidance on further developing our financial services sector in the future, to be more contributive to the economic growth and to to the improvement of Indonesian people's welfare.

65. May God the Almighty bless us every step of the way.

***Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Jakarta, 18 Januari 2018

Wimboh Santoso

Ketua Dewan Komisioner OJK – OJK Chairman